



**Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu**  
P-ISSN 2656-7202 – E-ISSN 2655-6626  
Volume 7 Nomor 1, Januari-Juni 2024  
DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v7i1.1506>

## Relasi Kuasa Dan Islamisasi : Dinamika Hukum Islam di Kesultanan Samudera Pasai

**Moona Maghfirah<sup>1</sup>**,

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

[Maghfirahmoona96@gmail.com](mailto:Maghfirahmoona96@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji Kesultanan Islam di Sumatera dengan fokus pada Kesultanan Samudra Pasai, salah satu kerajaan yang berpengaruh besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Secara sosiohistoris, Kesultanan Samudra Pasai bukan hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik dan otoritas, tetapi juga memainkan peran penting dalam berbagai dimensi kehidupan—politik, ekonomi, budaya, dan agama. Letaknya di wilayah barat Sumatera, sebagai titik awal masuknya Islam ke Nusantara, menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Studi ini menyoroti kompleksitas penerapan hukum di Samudra Pasai, di mana terdapat tumpang tindih antara hukum Islam dan hukum adat. Melalui pendekatan studi pustaka historis dan penerapan teori relasi kuasa Michel Foucault, penulis mengungkapkan bahwa proses Islamisasi di Samudra Pasai sarat dengan dinamika kekuasaan. Temuan menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam yang diterapkan oleh kesultanan sering kali mengalami intervensi oleh otoritas kesultanan demi kepentingan politik dan sosial penguasa. Analisis ini menyoroti bagaimana kekuasaan mempengaruhi dan membentuk penerapan hukum Islam di Kesultanan Samudra Pasai, memberikan wawasan tentang interaksi antara hukum, kekuasaan, dan agama dalam konteks sejarah Indonesia.

This article examines Islamic Sultanates in Sumatra with a focus on the Sultanate of Samudra Pasai, one of the most influential kingdoms in the development of Islam in the archipelago. Sociohistorically, the Sultanate of Samudra Pasai not only functioned as a center of political power and authority, but also played an important role in various dimensions of life-political, economic, cultural, and religious. Its location in the western region of Sumatra, as the starting point of Islam's entry into the archipelago, made Samudra Pasai an important center in the history of Islam in Indonesia. This study highlights the complexity of law implementation in Samudra Pasai, where there was an overlap between Islamic law and customary law. Through a historical literature study approach and the application of Michel Foucault's power relations theory, the author reveals that the Islamization process in Samudra Pasai was laden with power dynamics. The findings show that Islamic laws implemented by the sultanate were often intervened by sultanate authorities for the sake of the ruler's political and social interests. This analysis highlights how power influenced and shaped the application of Islamic law in the Sultanate of Samudra Pasai, providing insight into the interaction between law, power and religion in the context of Indonesian history.

Kata Kunci : Relasi Kuasa, Islamisasi, Hukum Islam, Kesultanan Samudera Pasai.

## Pendahuluan

Banyak diantara para sultan atau raja Islam menjadikan Islam sebagai agama negara dan dijadikan sebagai sumber penetapan hukum yang diberlakukan di wilayahnya. Sebagian menyusun atau membuat kebijakan, program-program yang secara langsung atau tak langsung memperkuat posisi Islam dan penyebaran Islam di wilayahnya, seperti pembinaan dan fasilitasi para ahli agama, mubaligh, pendai untuk berdakwah di wilayahnya, bahkan seringkali mengirimnya ke wilayah kesultanan atau kerajaan lain yang membutuhkannya. Kehadiran dan keberadaan kesultanan Samudra Pasai, secara sosiohistorik, ternyata tidak hanya tumbuh, hadir, dan berperan hanya sebagai “*center of political power and authority*”, namun juga menjalankan sejumlah peran dalam berbagai dimensi kehidupan—politik, ekonomi, budaya, dan agama itu sendiri. Terlebih Samudra Pasai terletak di wilayah barat yang merupakan pusat awal masuknya Islam ke Nusantara.

Kesultanan Samudera Pasai, sebagai kerajaan bercorak Islam besar di Indonesia, tepatnya di pesisir pantai utara Pulau Sumatra sebagai pusat pemerintahannya, dekat dengan Lhokseumawe. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kesultanan Islam besar yang muncul pada abad pertengahan, sekitar abad ke-13 dan sangat berpengaruh dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Bukan saja di Nusantara, kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan dalam penyebaran Islam di beberapa daerah Asia Tenggara diantaranya pesisir utara Jawa, Malaka, Trenggano, Patani, dan Brunei.<sup>1</sup> Terkait bukti bahwa kesultanan Samudra Pasai merupakan kesultanan Islam dapat dilihat dari salah satu pendapat petualang Muslim asal Maroko yang bernama Abu Abudullah Ibnu Batuthah pada tahun 1304 M- 1368, yang dikutip oleh Utriza “ Kesultanan Samudra Pasai menjelma menjadi pusat studi Islam tidak hanya di nusantara tetapi juga di Asia Tenggara”.<sup>2</sup>

Hal yang menarik adalah penulis beranggapan bahwa dalam proses Islamisasi Samudera Pasai terdapat problema relasi kuasa, khususnya dalam proses implementasi hukum Islam. Hal yang menjadi sorotan tentunya otoritas kesultanan pada masa tersebut. Oleh sebab itu, menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk menelusuri kembali bagaimana kehidupan beragama Islam di ruang lingkup kesultanan Samudra Pasai sebagai daerah yang menerapkan hukum Islam pertama di Nusantara. Berlandaskan dari penjelasan diatas, maka komunitas Muslim di Kesultanan Samudra Pasai menjadi pembahasan pokok pada artikel ini. Sehubungan dengan hal berkembangnya agama Islam di Kesultanan Samudra Pasai, ada beberapa hal yang perlu dilihat diantaranya: bagaimana proses islamisasi pada kesultanan Samudera Pasai? Bagaimana Islam menjadi landasan hidup pada masa kesultanan Samudera Pasai? Bagaimana problema relasi kuasa pada proses Islamisasi dan pada komunitas Muslim Samudera Pasai?

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian histori dengan tehnik studi pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji Kesultanan Samudera Pasai melalui analisis dokumen dan literatur yang relevan. Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk manuskrip kuno, catatan sejarah, buku, artikel jurnal, serta sumber-sumber elektronik yang kredibel. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri perpustakaan, arsip nasional, dan database akademik online untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif tentang perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kesultanan Samudera Pasai. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan berbagai peristiwa dan dinamika yang terjadi pada masa kejayaan kesultanan tersebut. Data

<sup>1</sup> Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).

<sup>2</sup> Ayang Utriza Yakin, “Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad ke-14 Masehi,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (September 7, 2015): 269–294.

kemudian dikaji dengan pisau analisis konsep kekuasaan oleh Michel Foucault guna melihat bagaimana dinamika peneraman hukum Islam dan kaitannya dengan kekuasaan di zaman itu. Validitas data dijaga dengan melakukan cross-referencing antar sumber dan mempertimbangkan konteks historisnya, sehingga hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman sejarah Kesultanan Samudera Pasai.

### Memotret Proses Islamisasi di Kesultanan Samudra Pasai

Pengislaman merupakan suatu perubahan terpenting yang pernah dialami Kerajaan Samudera pasai dalam sejarahnya. Namun, kapan waktu yang pasti Islam masuk ke Samudra Pasai, belum diketahui secara pasti, apalagi jika masuknya Islam itu didasarkan kepada mulai adanya masyarakat Islam disana.<sup>3</sup> Apabila kriteria yang dipakai didasarkan pada terbentuknya sistem politik, berupa lembaga kerajaan Islam, dapat dikatakan bahwa Kesultanan Islam Samudra Pasai terbentuk pada abad ke-13.

Sebelum memeluk agama Islam, budaya dan tradisi Samudera Pasai telah dipengaruhi oleh agama Budha dan Hindu. Selama masa kerajaan Sriwijaya, agama Budha berkembang di samping agama Hindu. Animisme juga masih hidup di samping agama Budha dan Hindu.<sup>4</sup> Itulah mengapa pada 1292, Marco Polo melaporkan bahwa Basman dan Samara (Sumatra) masih dihuni oleh para penyembah berhala. Kendati demikian, corak makam tertanggal akhir abad ke-13 yang ditemukan di Pasai menyebutkan bahwa Malik al-Saleh adalah sultan pertama kerajaan Samudera-Pasai meninggal pada 1297. Kita dapat menduga bahwa Islam menyebar dengan cepat dari Perlak ke Samudera-Pasai antara 1292 dan 1297.<sup>5</sup> Kita mengetahui bahwa menurut sumber-sumber Cina, dua utusan Muslim, Husain dan Sulaiman, datang dari Su-Mu-Ta-La (Samudera) mengunjungi Cina pada 1282. Setahun sebelumnya, pada 1281, Malayu (Samudera-Pasai) telah mengirimkan dua utusan Muslim, Sulaimann dan Syamsuddin ke Cina. Ini alasan mengapa De Jong menduga bahwa kerajaan Islam Samudera-Pasai didirikan sebelum pengirim dua utusan ke Cina dan kunjungan Marco Polo.<sup>5</sup>

Demikian juga bagi E. Gerini yang mengira bahwa Samudra telah diislamkan antara 1270-1275.<sup>6</sup> Mulyana lebih jauh mengatakan bahwa kesultanan Pasai telah didirikan oleh Nizam al-Din al-Kamil, kepala angkatan laut Khilafah Fatimayah di Mesir pada 1128 untuk menguasai perdagangan lada di pantai Timur Sumatra.<sup>7</sup> Tetapi, ia tidak memberikan satu pun bukti untuk menegaskan hipotesanya. Terkait dengan masuknya kekuasaan Samudera-Pasai ke dalam agama Islam, kita menduga bahwa raja Samudera-Pasai, Malik al Saleh, memeluk agama Islam melalui pernikahannya dengan puteri sultan Perlak.<sup>8</sup> Adapun

---

<sup>3</sup> Muhammad Gade Ismail, *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah : Abad Ke-13 Sampai Awal Abad Ke 16* (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> R. O. Winstedt, "The Chroconiles of Pasai" *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 16, no. 2 (131) (1938): 24–30.

<sup>6</sup> Teuku Ibrahim Alfian, *Kronika Pasai : Sebuah Tinjauan Sejarah* (Universitas Gadjah Mada, 1973).

<sup>7</sup> Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara* (LKIS, 2005).

<sup>8</sup> Taifik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia#Taufik Abdullah*, Cet. 1. (LP3, n.d.).

menurut Hikayat Raja-raja Pasai,<sup>9</sup> raja Merah Silu kemungkinan masuk agama Islam setelah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad menyuruh raja Merah Silu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi meludah ke dalam mulut Merah Silu agar bisa mengucapkan syahadat. Kemudian, Rasulullah memberikan nama Islam, Malik al-Saleh. Raja ini dapat membaca al-Qur'ân dengan benar hingga akhir tanpa lebih dahulu belajar.

Menurut cerita lain, Samudera ini diislamkan oleh seorang Shakh Ismail langsung datang dari Makkah berdasarkan perintah Sharif Makkah yang mengingatkan tentang hadith Rasulullah untuk pergi mengislamkan Samudera. Saat itu, para Sharif Makkah berada di bawah kekuasaan Mesir. Shaykh Ismail bertemu Malik al-Saleh dan menyuruhnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Keesokan harinya, Shaykh Ismâil dan seorang fakir meminta raja membaca al-Qur'an. Ia dapat membaca al-Qur'ân seluruhnya tanpa seorang pun pernah mengajarnya sebelumnya.<sup>10</sup>

Selanjutnya, setelah raja Samudera-Pasai masuk Islam, maka semua para pembesar kerajaan dan penduduknya masuk Islam juga. Pergantian nama dari “raja” menjadi “sultan” dan “kerajaan” menjadi “kesultanan” ini, menurut Azra, dipandang tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam. Artinya, pengambilalihan ini tidaklah melibatkan proses transisi yang rumit, melainkan hanya merupakan konsekuensi yang wajar dari proses islamisasi.<sup>11</sup> Cerita tentang pengislaman Kerajaan Samudera di atas juga memperlihatkan suatu proses integrasi antara Islam, perdagangan, dan politik yang menjadi karakter penting sejarah awal Islam di Nusantara. Berislamnya Merah Silu bertepatan dengan proses pembentukan kekuasaannya menjadi sebuah kerajaan. Merah Silu masuk Islam tidak lama setelah dia memangku kekuasaan dan mentransformasikan kerajaannya menjadi kerajaan Islam terkemuka yang mencapai puncaknya pada abad XIV M.

Secara umum penyebaran Islam pada saat itu berlangsung secara damai. Hal ini disebabkan karena Islam yang datang ke kawasan ini tidaklah dibawa oleh para tentara yang melakukan penaklukan, melainkan oleh para ulama dan juga pedagang yang mendatangi kawasan ini dan menyebarkan ajaran Islam. Di dalam *Sejarah Melayu*, masyarakat Nusantara berbondong-bondong memeluk agama baru ini setelah mereka mengetahui rajanya masuk Islam.<sup>12</sup>

### **Jejak Spiritual: Implementasi Islam dalam Kehidupan Komunitas Muslim Kesultanan Samudera Pasai**

Kemunculan bentuk baru kekuasaan pada akhir abad ke-13 di Samudra Pasai yaitu kesultanan. Setelah perpindahan agama baru oleh raja dan penduduknya, Islam memainkan peranan penting. Samudera Pasai telah menjadi pusat penyebara agama Islam. Perubahan sistem politik Samudera Pasai menjadi Islami mendorong penggantian sistem hukum. Pemerintahnya bersifat teokrasi dan rakyatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Perihal tentang Islam dan penerapan hukum di Samudera Pasai dapat diketahui berdasarkan tulisan Ibn Batutah seorang pelancong Maroko abad ke-14. Berdasarkan kisah-kisahannya, sultan Samudera Pasai adalah seorang Muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam

<sup>9</sup> A. H. Hill, “Hikayat Raja-Raja Pasai,” *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 33, no. 2 (190) (1960): 1–215.

<sup>10</sup> Hamka *Sejarah Ummat Islam IV* (Bulan Bintang, 1976).

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama : Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005).

<sup>12</sup> Abdullah -p, *Sedjarah Melaju* (Djambatan, 2000).

dan penduduknya menjalankan aruran ajaran Islam. Di Samudra Pasai juga diberlakukan lembaga-lembaga keagamaan seperti *qadhi* dan *mufti*.<sup>13</sup> Ibnu Batutah menceritakan bahwa *Qadhi*-nya berasal dari Syiraz bernama Amir Sayyid al-Shirazi. Sedangkan *mufti* disini juga bisa disebut sebagai fakih. Secara lebih rinci, Ibn Batutah dalam bukunya *al-Rihlah* menggambarkan bagaimana praktik hukum Islam di Samudera Pasai. Sebagaimana yang dinukil oleh Yakin, Sultan pada saat itu menganut madzab Syafi'i. mengadakan pertemuan-pertemuan bersama fukaha, mengadakan pengajian. Tambahan lagi, Ibn Batutah juga mendeskripsikan bahwa Sultan berjalan kaki untuk salat Jumat.<sup>14</sup> Hal di atas memberikan informasi dan gambaran tentang hukum Islam dan penerapannya di Samudera Pasai; tentang madzhab fiqh, qadi dan fakih.

Selain itu, Armia mengatakan kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam. Dalam artikelnya ia juga memberikan contoh, pelaksanaan hukum pidana Islam telah dilaksanakan di kerajaan ini, seperti melaksanakan hukuman rajam untuk *Meurah Pupoeke*, seorang anak raja yang terbukti melakukan zina. Pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan ini tidak mengenal jabatan dan golongan, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat biasa apabila terbukti melanggar hukum Islam pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>15</sup>

### 1. Madzhab Syafi'i pada Kesultanan Samudera Pasai

Ibnu Batutah mengatakan bahwa madzhab hukum Islam yang sultan dan penduduknya ikuti adalah mazhab Syafi'i.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-14, umat Islam di Samudra Pasai telah mengikuti mazhab syafi'i. Terkait mazhab Syafi'i, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa mazhab syafi'i diajarkan langsung oleh Syaikh Ismail. Utriza dalam artikelnya mengatakan bahwa mazhab Syafi'i masuk ke Nusantara bersamaan dengan kedatangan Islam.<sup>17</sup> Seperti dijelaskan di atas, bahwa Nusanatara adalah jalur penting untuk perdagangan internasional dari Barat ke Timur. Pusat-pusat perdagangan di Timur Tengah seperti Kairo, Jeddah, dan Yama secara mayoritas penganut mazhab Syafi'i. Sumber lain juga turut memberikan pendapat bahwa setelah keruntuhan Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syi'ah pada tahun 1284, Dinasti Mamluk yang bermadzhab Syafi'i mengambil alih kekuasaan Pasai, dengan mengutus Syaikh Ismail untuk merubut Pasai dan mengislamkan Raja Merah Selu. Pada akhirnya kerajaan Samudra Pasai menganut madzhab Syafi'i.<sup>18</sup>

Sudah banyak diketahui bahwa semananjung Arab, Persia, dan India merupakan negeri-negeri yang melakukan perdagangan dengan Nusantara. Adalah mungkin diantara para pedagang tersebut, di antaranya beragama Islam dan mengikuti mazhab Syafi'i, lalu menyebarkannya. Para pedagang ini menikah dengan perempuan pribumi. Sangat mungkin,

<sup>13</sup> - Syifa and Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, "Poitik Hukum Islam Era Kesultanan," *Reflektika* 12, no. 1 (October 26, 2017): 1-19-19.

<sup>14</sup> Yakin, "Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad ke-14 Masehi."

<sup>15</sup> Muhammad Siddiq Armia, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam : Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (February 15, 2018): 172-189.

<sup>16</sup> Azra, *Jaringan Ulama*.

<sup>17</sup> Ayang Utriza, "Islamisasi Dan Syariatisasi Samudera Pasai Abad Ke-14 Masehi," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 9, Nomor 2 (March 2015).

<sup>18</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap : Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam Di Barat Dan Timur* (Saufa, 2014).

sebelum menikah, para perempuan pribumi tersebut masuk Islam agar bisa dinikahi menurut mazhab syafi'i. Keluarga mereka juga demikian masuk agama Islam.

Dengan demikian, hukum Islam memainkan peranan penting dalam mengislamkan penduduk Nusantara. Hukum Islam lambat laun mendapatkan tempat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sana kemudian sedikit demi sedikit mazhab Syafi'i dipraktikkan. Dari Samudra-Pasai, mazhab fiqh tersebut tersebar bersamaan dengan agama Islam.<sup>19</sup> Pada akhirnya, menurut Hamka, dari Pasailah dikembangkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500 M) para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Benteng Kebijakan: Sistem Pemerintahan Islam dan Pemahaman Dar al-Islam dan Dar al-Harb di Samudera Pasai

Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam merupakan episode penting dalam proses Islamisasi Nusantara. Pembentukan kerajaan Islam menandai awal terintegrasinya nilai-nilai Islam secara lebih intensif ke dalam sistem sosial dan politik khususnya. Bahkan, kesultanan menjadi basis upaya menerapkan ajaran Islam dikalangan masyarakat. Menurut Azyumardi Arza, konversi penguasa ke Islam dari 'kerajaan' ke entitas politik 'kesultanan' tidak mengandung kesulitan apa-apa atau proses yang berbelit-belit.<sup>21</sup> Sebelumnya kehadiran Islam terbatas pada pembentukan komunitas Islam dipusat perdagangan. Namun, dengan berdirinya kesultanan, Islam mulai tampil sebagai kekuatan politik dan budaya. Dengan adanya Sultan yang menjadi Muslim, Islam memperoleh kekuatan politik, sehingga perkembangannya semakin efektif dan pengaruhnya semakin mendalam dalam struktur kehidupan masyarakat.

Samudra Pasai segera tumbuh menjadi sebuah negara Muslim yang kuat setelah Islam dapat diterima oleh penduduk setempat dan menemukan pijakannya yang kokoh di kota itu. Bentuk baru kekuasaan, yaitu kesultanan, telah merubah secara mendalam sistem politik yang telah dikenal hingga saat ini di kepulauan nusantara. Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan raja Muslim pertama di kerajaan Samudra Pasai merupakan seorang yang ahli dibidang politik, semenjak beliau memeluk agama Islam maka sistem pemerintahan yang dijalankan menganut ajaran-ajaran agama yang beliau anut yaitu agama Islam.

Dari struktur pemerintahan, sultan menjadi pimpinan tertinggi, yang biasanya memimpin atau memerintah secara turun temurun. Selain terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, juga terdapat Menteri Besar (Perdana Menteri atau Orang Kaya Besar), seorang Bendahara, seorang Komandan Militer atau Panglima angkatan laut yang lebih dikenal sebagai Laksamana, seorang Sekretaris Kerajaan dan beberapa orang Syahbandar yang mengepalari dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu.<sup>22</sup> Sultan Malik al Saleh wafat pada tahun 1297 dan dimakamkan di Kampung Samudra Mukim Blang Me dengan nisan makam berciri Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Malik al Thahir I yang memerintah sejak 1297-1326. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Perlak kemudian

<sup>19</sup> "Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara | Mihara | Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan," accessed September 25, 2019,

<sup>20</sup> Hamka, *Sejarah Ummat Islam IV*.

<sup>21</sup> Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana Dan Kekuasaan* (Remaja Rosda Karya, 1999, 1999).

<sup>22</sup> Ismail, *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah*.

disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik al tahir II memerintah sejak 1326-1348 M. Raja yang bernama asli Ahmad ini sangat teguh memegang ajaran asli dan aktif menyiarkan Islam ke negeri-negeri sekitarnya. Akibatnya, Samudra Pasai berkembang sebagai pusat penyebaran Islam. Pada masa pemerintahannya, Samudra pasai memiliki armada laut yang kuat sehingga para pedagang merasa aman singgah dan berdagang di sekitar Samudra Pasai.<sup>23</sup>

Konsep geografi politik Islam juga tampak di Samudra Pasai. Samudra Pasai juga membagi wilayah nya dengan sebutan *Dar Al-Islam* dan *Dar Al-Harb*.<sup>24</sup> Ibnu Batutah menekankan bahwa sultan dan rakyatnya suka berjihad melawan para kafir. Para fukaha membagi dunia menjadi dua wilayah politik keagamaan: *Dar al-Islam*, daerah islam atau wilayah orang Islam; dan *Dar al-Harb*, daerah perang atau wilayah musuh. Ordorigo de Pordenone, seorang pendeta Fransiskan, sebelum kedatangan Ibnu batutah, telah mengunjungi Samudra Pasai pada 1323. Ia memberitahu bahwa kerajaan Pasai selalu berperang dengan kerajaan Lamuri, yang saat itu belum Islam.<sup>25</sup> T.W Arnold juga menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai menyatakan perang kepada kerajaan tetangga yang non-Muslim agara mereka tunduk dan harus membayar jizyah kepada kerajaan.<sup>26</sup> Penerapan hukum Islam terus berlaku hingga akhir sultan Samudra Pasai.

### 3. Praktik Pendidikan Agama pada Masa Kesultanan Samudera Pasai

Pada masa pemerintahan Malik al-Zahir, kegiatan keagamaan cukup semarak. Hal ini terutama dapat diperlihatkan dengan kehidupan keagamaan disana. Ibnu Batutah menyebutkan, bahwa pada saat kunjungannya kesana pada tahun 1345, Raja Malik al-Zahir merupakan seorang raja yang taat kepada ajaran Nabi Muhammad saw, dan baginda senantiasa dikelilingi oleh para teologi Islam, yang salah satu diantaranya ialah Qadi Syarif Amir Sayyid dari Shiraz, dan Tajal-Din dari Istahan.<sup>27</sup> Sultan yang terkenal alim dalam ilmu agama dan bermazhab Syafi'i, mengadakan pengajian sampai waktu sholat Ashar dan fasih berbahasa Arab serta mempraktekkan pola hidup yang sederhana.<sup>28</sup> Keterangan Ibnu Batutah tersebut dapat ditarik kesimpulan pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai sebagai berikut:

- a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syari'at adalah Fiqh mazhab Syafi'i
- b. Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis ta'lim dan halaqoh
- c. Tokoh pemerintahan merangkap tokoh agama
- d. Biaya pendidikan bersumber dari negara.

Pada zaman kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaannya pada abad ke-14 M, maka pendidikan juga tentu mendapat tempat tersendiri. Mengutip keterangan Tome Pires, yang menyatakan bahwa di Samudra Pasai banyak terdapat kota, dimana antar warga kota tersebut terdapat orang-orang berpendidikan.<sup>29</sup> Menurut Ibnu Batutah juga, Pasai pada abad ke-14 M, sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan banyak

<sup>23</sup> Hamka, *Sejarah Ummat Islam IV*.

<sup>24</sup> Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara*.

<sup>25</sup> Utriza, "Islamisasi Dan Syariatisasi Samudra Pasai Abad Ke-14 Masehi."

<sup>26</sup> Suparman, *Sejarah Islam Di Asia & Eropa : Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern* (CV Pustaka setia bandung, 2013).

<sup>27</sup> Ismail, *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah*.

<sup>28</sup> dkk- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008, n.d.).

<sup>29</sup> Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Cet. 1. (Deepublish, 2016).

berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam. Ibnu Batutah menyatakan bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang yang cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Bila hari jum'at tiba, Sultan sembahyang di Masjid menggunakan pakaian ulama, setelah sembahyang mengadakan diskusi dengan para alim pengetahuan agama, antara lain: Amir Abdullah dari Delhi, dan Tajudin dari Ispahan. Bentuk pendidikan dengan cara diskusi disebut Majlis Ta'lim atau halaqoh. Sistem halaqoh yaitu para murid mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah-tengah lingkaran murid dengan posisi seluruh wajah murid menghadap guru.<sup>30</sup>

#### 4. Ritual Keagamaan Islam Pada Masa Kesultanan Samudera Pasai

Menurut Arifin dalam karyanya Malikussaleh dari Pasai, yang dinukil oleh Sulasman, dalam bidang keluarga dan sosial kemasyarakatan, *Hikayat Raja-Raja Pasai* menceritakan bahwa Sultan Malikus Saleh melaksanakan perintah yang dianjurkan ajaran Islam, seperti merayakan kelahiran anaknya dengan melakukan aqiqah, bersedekah kepada fakir miskin, mengkhitan anaknya, dan melakukan tata cara penguburan mayat; mulai memandikan, mengafani, menyalatkan, sampai menguburnya.<sup>31</sup> Mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga di Pasai diberlakukan hukum Islam sehingga dijuluki 'daerah Serambi Mekkah' hingga sekarang.

Hidup dengan berasakan Islam membuat penduduk terasa dihargai satu sama lain, yang mana sebelumnya agama Hindu-Budha membuat penduduk hidup di lingkup yang membedakan kasta. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Tempat tinggal penduduk berbentuk rumah-rumah yang didirikan diatas tiang-tiang dari pohon pinang atau kelapa yang tinggi, dan menggunakan rotan sebagai pengikatnya. Sumber lain mengatakan bahwa kehidupan sosial di Pasai menjadi bercampur antara penduduk asli, para pedagang dari timur tengah, dan india.<sup>32</sup>

### **Kekuasaan dalam Kehakiman: Analisis Relasi Kuasa dan Penerapan Hukum Islam dalam Otoritas Kesultanan Samudera Pasai**

Berdasarkan *Sejarah Melayu*, islamisasi secara besar-besaran dimulai setelah Islam diterima oleh elit kerajaan. Dengan demikian pola islamisasi di dalam *Sejarah Melayu* menggunakan pola top-down, yaitu Islam diterima oleh elit kerajaan dan diikuti oleh masyarakat luas. Kesultanan Samudera Pasai memiliki kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam di kawasan ini. Setelah menjadi kesultanan yang mapan, Samudera Pasai menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya sekaligus mengislamkan kerajaan-kerajaan tersebut. Dalam proses penerimaan Islam itu, raja dan ulama memiliki peran yang penting dalam penyebaran agama Islam. Sultan yang dianggap sebagai bayangan Tuhan di muka bumi, sebagai sesembahan, dan sebagai pusat kehidupan berhasil mengislamkan hampir seluruh masyarakatnya dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Selain sultan, ulama juga berperan besar dalam islamisasi khususnya dengan berbagai keistimewaan atau karomah

<sup>30</sup> "Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara | Mihara | Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan."

<sup>31</sup> Suparman, *Sejarah Islam Di Asia & Eropa : Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern* (CV Pustaka setia bandung, 2013).

<sup>32</sup> Ibrahim Alfian, *Kronika Pasai*.

yang mereka miliki. Ulama juga menduduki jabatan-jabatan strategis di dalam struktur kerajaan seperti sebagai penasihat sultan dan Qadhi atau kepala pengadilan agama.

Jika mempertimbangkan referensi yang ditulis dalam *Sejarah Melayu*, Islamisasi yang terdapat dalam *Sejarah Melayu* mendukung teori islamisasi yang menyatakan bahwa Islam disebarkan oleh para Sufi sengaja datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Islam secara cepat tersebar di Nusantara karena mereka mampu mengislamkan para penguasa yang memiliki posisi yang sangat tinggi di hadapan rakyatnya. Para penguasa, yang menempati kasta ksatria dalam struktur masyarakat Hindu, hanya mungkin menerima ajaran dari kasta di atasnya, yaitu brahmana yang dimainkan oleh para ulama. Adapun kasta Waisya, yaitu para pedagang, menjadi faktor pendukung Islamisasi sebagaimana yang diperankan oleh nahkoda Syekh Ismail dalam proses pengislaman Kerajaan Samudera Pasai.

Selain itu, hukum Islam di Samudera-Pasai hanyalah sebagian hukum yang diterapkan di samping hukum adat. Hukum Islam tidak diterapkan secara kaku. Hal ini dapat dilihat dari kisah yang diceritakan dalam *Hikayat Raja-raja Pasai*<sup>33</sup>, saat Sultan Ahmad membunuh anak lelakinya dan memperkosa anak perempuannya, ia tidak dihukum mati. Selain itu, mazhab Syafi'i yang diikuti di Samudera-Pasai itu sangat lentur, bahkan tidak terlalu benar-benar diikuti.

Selain itu, Menurut mazhab Syafi'i, negara-negara tetangga yang takluk kepada Samudera-Pasai harus memiliki salah satu agama samawi, Nasrani atau Yahudi. Jika mereka adalah para penyembah berhala, menurut Imam Syafi'i, pemerintahan Islam tidak bisa menerima jizyah. Pemerintahan Islam harus mengajukan dua pilihan kepada para penyembah berhala: menjadi Islam atau dibunuh. Sesungguhnya, kerajaan-kerajaan tetangga Samudera-Pasai adalah para penyembah berhala. Kendati demikian, mereka membayar jizyah dan kesultanan menerimanya. Umat Islam di Samudera-Pasai tidak mengikuti secara harfiah mazhab Syafi'i. Bisa dikatakan bahwa hukum Islam dilaksanakan secara terbatas, seperti jihad, kewajiban membayar jizyah bagi orang bukan-Islam, penerapan konsep kewilayahan, dan keberadaan lembaga-lembaga keagamaan, seperti qadhi dan fakih di kesultanan Samudera-Pasai.

Kondisi di atas hanya segelintir dari contoh adanya relasi kuasa dalam proses islamisasi di Samudera Pasai. Menurut konsep pemikiran Michel Foucault,<sup>34</sup> seorang filsuf Perancis, relasi kuasa bermaksud menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi; di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Relasi kuasa tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki atau dipegang oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai sesuatu yang terdistribusi dan beroperasi melalui jaringan hubungan sosial. Kekuasaan bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi bekerja melalui berbagai praktik, institusi, dan diskursus dalam masyarakat. Sederhanya, Foucault memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan berfungsi dalam masyarakat, bukan hanya melalui paksaan atau dominasi, tetapi melalui mekanisme yang lebih halus dan tersebar yang membentuk perilaku, pikiran, dan identitas individu.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai."

<sup>34</sup> Foucault, M. (1975). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books.; Foucault, M. (1976). *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. Translated by Robert Hurley. New York: Pantheon Books

<sup>35</sup> Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (1982). *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: University of Chicago Press

---

Untuk lebih rinci, penulis menerapkan teori relasi kuasa Michel Foucault dengan kasus hukum di Kesultanan Samudra Pasai, untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diterapkan dan bagaimana penguasa menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan.

#### 1. Hukum sebagai Alat Kekuasaan

Foucault menunjukkan bahwa hukum sering digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mengontrol masyarakat dan mempertahankan kekuasaan mereka. Di Samudra Pasai, hukum Islam diadopsi dan diterapkan sebagai hukum negara, tetapi penerapan ini tidak sepenuhnya murni dari ajaran Islam. Penguasa sering kali memodifikasi hukum untuk memenuhi kepentingan politik dan sosial mereka sendiri. Sultan Malik Al-Saleh memeluk Islam dari Syaikh Ismail dan mengadopsi mazhab Syafi'i. Namun, penerapan hukum Islam mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan politik dan sosial untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menjaga stabilitas kerajaan. Ini menunjukkan bagaimana hukum dapat disesuaikan untuk melayani kepentingan penguasa.

#### 2. Pengetahuan dan Kekuasaan (Power/Knowledge)

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait erat. Mereka yang menguasai pengetahuan memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan dan mengatur realitas sosial. Dalam konteks Samudra Pasai, pengetahuan tentang hukum Islam dan interpretasinya berada di tangan penguasa dan ulama yang mendukung mereka. Dalam sejarah, interpretasi hukum oleh ulama di istana yang mendukung kebijakan Sultan. Misalnya, penerapan jizyah (pajak) yang tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam menunjukkan bagaimana pengetahuan tentang hukum Islam digunakan untuk mendukung kebijakan kekuasaan.

#### 3. Pengawasan (Surveillance) dan Normalisasi

Foucault menggambarkan bagaimana pengawasan digunakan untuk mengontrol masyarakat dan menormalkan perilaku tertentu. Di Samudra Pasai, pengawasan dilakukan melalui penerapan hukum Islam yang ketat dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah dan kehidupan sosial. Penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti aturan tentang aqiqah, hukum jenazah, dan pengajian rutin di istana, menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk mengawasi dan mengatur masyarakat. Hal ini menciptakan norma-norma yang harus diikuti oleh masyarakat, sesuai dengan kepentingan penguasa.

#### 4. Resistensi terhadap Kekuasaan

Foucault juga menunjukkan bahwa di mana ada kekuasaan, selalu ada resistensi. Masyarakat atau kelompok tertentu mungkin menolak atau beradaptasi terhadap hukum yang mereka anggap tidak adil. Meskipun tidak banyak bukti resistensi eksplisit di Samudra Pasai, kemungkinan adanya penyesuaian atau penolakan terhadap beberapa hukum yang tidak adil atau terlalu ketat bisa saja terjadi, terutama jika hukum tersebut dianggap lebih menguntungkan penguasa daripada masyarakat umum.

#### 5. Teknologi Pemerintahan (Governmentality)

Konsep governmentality Foucault mengacu pada cara di mana negara dan institusi lainnya mengatur populasi. Di Samudra Pasai, hukum Islam berfungsi sebagai teknologi pemerintahan untuk mengatur dan mengontrol masyarakat, memastikan bahwa mereka tetap dalam kerangka yang diinginkan oleh penguasa. Pembagian wilayah menjadi Dar-al Islam dan Dar-al Harb, dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif menunjukkan upaya penguasa untuk mengatur dan mengontrol masyarakat secara keseluruhan melalui hukum.

Dengan menggunakan teori Foucault, kita dapat memahami bahwa penerapan hukum di Kesultanan Samudra Pasai bukan hanya tentang kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengatur dan mengontrol masyarakat. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat dimanipulasi dan digunakan sebagai alat kekuasaan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penguasa. Dalam konteks sejarah dan politik, teori relasi kuasa menunjukkan bahwa penerapan hukum oleh suatu negara jarang sepenuhnya bebas dari intervensi penguasa. Contoh yang relevan dalam banyak konteks, termasuk Kesultanan Samudra Pasai yang dibahas di atas, menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam diterapkan, intervensi oleh otoritas kesultanan dapat mengubah atau menyesuaikan penerapan hukum tersebut demi kepentingan politik dan kekuasaan. Hal ini tentu sejalan dengan teori relasi kuasa Michel Foucault, menjelaskan bagaimana kekuasaan digunakan dan dimanipulasi dalam berbagai konteks sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks penerapan hukum suatu negara, teori ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berfungsi sebagai entitas netral dan objektif, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan penguasa.

### Kesimpulan

Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang muncul pada abad ke-13, yang mana sebelumnya ada Kerajaan Perlak. Sultan Malik Al-Saleh adalah Raja yang memeluk agama Islam dari seorang Syarif Mekkah yang bernama Syaikh Ismail yang juga membawa pengaruh kepada Kerajaan untuk menganut madzab Syafi'i. Proses islamisasi para pemimpin menjadikan segala aspek kehidupan berlandaskan dengan ajaran Islam, seperti sistem pemerintahan, hukum yang diterapkan, serta sistem pendidikan yang dilakukan dengan pengajian rutin di Istana. Otoritas kesultanan yang berlandaskan hukum Islam menjadi hukum positif di Samudra Pasai untuk menjalankan aspek-aspek kehidupan dari kelahiran (*aqiqah*) sampai urusan jenazah. Para sultannya yang sangat alim dan bijaksana, kental akan ilmu agama. Dari sisi geografinya pun, Samudra Pasai membagi dua wilayah yaitu *Dar-al Islam* dan *Dar- al Harb*. Terlepas dari kisah-kisah yang menggambarkan tentang komunitas Muslim di Samudera Pasai yang berdasarkan hukum Islam, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Seperti korelasi antara hukum Islam dan hukum adat yang dijalankan oleh kesultanan. Penerapan hukuman kepada Sultan yang tidak diberlakukan dan juga syarat penerapan Jizyah yang tidak dijalankan sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama Islam. Dalam konteks Kesultanan Samudra Pasai, teori Foucault membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam yang diterapkan tidak sepenuhnya bebas dari intervensi penguasa. Penguasa mungkin menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, mengatur populasi, dan membentuk norma-norma sosial yang mendukung kepentingan mereka. Intervensi ini dapat mencakup modifikasi atau adaptasi hukum Islam untuk mencerminkan kepentingan politik dan kekuasaan lokal, menunjukkan

bahwa penerapan hukum selalu terkait dengan dinamika kekuasaan yang kompleks. Ihwal ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dan bagaimana kekuasaan mempengaruhi penerapan dan penafsiran hukum. Hal ini bisa diasumsikan bahwa hukum-hukum yang diterapkan oleh Kesultanan tidak sepenuhnya dengan ajaran Islam, masih ada intervensi oleh otoritas kesultanan demi kepentingan pemimpin itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Abdullah -p. *Sedjarah Melaju*. Djambatan, 2000.
- Abdullah, TaUfik. *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* #Taufik Abdullah. Cet. 1. LP3, n.d.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap : Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam Di Barat Dan Timur*. Saufa, 2014.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (February 15, 2018): 172–189.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama : Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Renaissans Islam Asia Tenggara : Sejarah Wacana Dan Kekuasaan*. Remaja Rosda Karya, 1999, 1999.
- Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (1982). *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Foucault, M. (1975). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1976). *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. Translated by Robert Hurley. New York: Pantheon Books.
- Hamka. *Sejarah Ummat Islam IV*. Bulan Bintang, 1976.
- Hill, A. H. "Hikayat Raja-Raja Pasai." *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 33, no. 2 (190) (1960): 1–215.
- Ibrahim Alfian, Teuku. *Kronika Pasai : Sebuah Tinjauan Sejarah*. Universitas Gadjah Mada, 1973.
- Ismail, Muhammad Gade. *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah : Abad Ke-13 Sampai Awal Abad Ke 16*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Muljana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara*. LKIS, 2005.
- Rofi, Sofyan. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Deepublish, 2016.
- Suparman. *Sejarah Islam Di Asia & Eropa : Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern*. CV Pustaka setia bandung, 2013.
- . *Sejarah Islam Di Asia & Eropa : Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern*. CV Pustaka setia bandung, 2013.
- Syifa, -, and Nabila Saifin Nuha Nurul Haq. "Politik Hukum Islam Era Kesultana." *Reflektika* 12, no. 1 (October 26, 2017): 1-19–19.
- Tjandrasasmita, Uka. *Arkeologi Islam Nusantara*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

- 
- Utriza, Ayang. "Islamisasi Dan Syariatisasi Samudera Pasai Abad Ke-14 Masehi." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 9, Nomor 2 (March 2015).
- Winstedt, R. O. "The Chronicals Of Pasai." *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 16, no. 2 (131) (1938): 24–30.
- Yakin, Ayang Utriza. "Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad ke-14 Masehi." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (September 7, 2015): 269–294.
- Zuhairini, dkk-. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, n.d.
- "Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara | Mihara | Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan." Accessed September 25, 2019. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/5454/6054>.